

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i1.1418>

## **Penerapan Manajemen Krisis Dalam Pengelolaan Bencana Longsor Banaran, Pulung, Ponorogo**

### ***Implementation of Crisis Management In Management of Longsor Disaster Banaran, Pulung, Ponorogo***

**Muhamad Fajar Pramono<sup>1\*</sup>, Setiawan Lahuri<sup>2</sup>, Mohammad Ghozali<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuludin, Universitas Darussalam Gontor,  
Jawa Timur, Indonesia*

<sup>2,3</sup>*Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor,  
Jawa Timur, Indonesia*

\*Penulis Korespondensi: [mfpramono@unida.gontor.ac.id](mailto:mfpramono@unida.gontor.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi pendampingan kepada Pemerintahan Desa Banaran Kecamatan Pulung dalam menerapkan manajemen krisis dalam penanganan bencana tanah longsor di Banaran. metode pelaksanaan pendampingan yang dilakukan, antara lain, yaitu: 1) ekspos ke media sosial. 2) Rekrutmen relawan 3) Penyusunan action-plans pendampingan. 4) pemetaan relawan dan proses penanganan bencana tanah longsor di Banaran 5) Melakukan studi banding. 6) Melakukan Focus Group Discutios (FGD). 7) Melakukan pelatihan/ workshop Pemetaan Rawan Bencana. 8) melakukan audensi dengan stakeholder untuk menjadi mutu dan kelangsungan program tersebut. Berdasarkan uraian di atas ditarik kesimpulan, Pertama, bahwa capaian program dengan rancangan program di awal ada yang sesuai, seperti, perubahan dalam pencegahan. Sedangkan yang melampaui capaian adalah dalam tahap tanggap bencana dan rehabilitasi. Adapun yang kurang sesuai dengan capaian adalah dalam tahap rekonstruksi. Kedua, perubahan yang dialami oleh mitra dalam hal ini pemeritahan Desa Banaran dan masyarakatnya adalah arti pentingnya pencegahan, yang selama ini dianggap remeh, ternyata berakibat fatal.

**Kata kunci:** manajemen krisis; pengelolaan bencana longsor; banaran pulung ponorogo

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this activity is to provide assistance to the Village Government of Banaran Pulung District in applying crisis management in handling longsor land disaster in Banaran. methods of implementation of assistance performed, among others, namely: 1) exposure to social media. 2) Recruitment of volunteers 3) Preparation of action-plans mentoring. 4) Volunteer mapping and longsor land disaster handling process in Banaran 5) Conduct a comparative study. 6) Conduct Focus Group Discutios. 7) Conducting workshop on Disaster Prone Mapping. 8) conduct audits with stakeholders to become the quality and continuity of the program. Based on the above description conclusions are drawn, Firstly, that the achievements of the program with the design of the program in the beginning there are appropriate, such as, changes in prevention. While that goes beyond achievement is in the stage of disaster response and rehabilitation. The less suitable for achievement is in the reconstruction phase. Second, the changes experienced by partners in this case Desa Banaran government and the community is the importance of prevention, which has been considered trivial, was fatal.*

**Keywords:** crisis management; landslide disaster management; banaran pulung ponorogo

## PENDAHULUAN

Fearn-Banks (1996:1) mendefinisikan krisis sebagai “*a major occurrence with a potentially negative outcome affecting an organization, company or industry, as well as its publics, products, services or good name*”. Biasanya sebuah krisis mengganggu transaksi normal dan kadang mengancam kelangsungan hidup atau keberadaan organisasi. Krisis pada dasarnya adalah sebuah situasi yang tidak terduga, artinya organisasi umumnya tidak dapat menduga bahwa akan muncul krisis yang dapat mengancam keberada-anya. Sebagai ancaman ia harus ditangani secara cepat agar organisasi dapat berjalan normal kembali setelah itu. Untuk itu Holsti melihat krisis sebagai “*situations characterized by surprise, high threat to important values, and a short decision time*” (Dikutip dalam Guth, 1995 : 125). Krisis membawa keterkejutan dan sekaligus mengancam nilai-nilai penting organisasi serta hanya ada waktu yang singkat untuk mengambil keputusan.

Shrivastava dan Mitroff (1987: 6) mendefinisikan krisis perusahaan sebagai “*events that threaten their most important goals of survival and profitability*”. Krisis menurut mereka diasosiasikan dengan kerusakan yang berskala luas terhadap kehidupan manusia, lingkungan alam dan institusi social dan politik. Krisis juga merupakan “*a disruption that physically affects a system as a whole and threaten its basic assumptions, its subjective sense of self, its existential core*”. Menurut mereka, krisis biasanya memiliki tiga dampak, yaitu pertama ancaman terhadap legitimasi organisasi, adanya perlawanan terhadap misi organisasi, dan ketiga, terganggunya cara orang melihat dan menilai organisasi. Adapun yang dimaksud organisasi dalam konteks ini adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan membicarakan aspek penanggulangan bencana dari perspektif ilmu sosial akan lebih mengarah pada pola *behavioralisme seseorang dalam mempersepsikan suatu bencana*. Cara pandang ini setidaknya menjadi penting untuk melihat dampak bencana terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Penekanan terhadap aspek sosial terhadap skema penanggulangan bencana sendiri dikarenakan adanya perubahan paradigma ilmu bencana. Bencana kini bukan lagi dianggap sebagai fenomena yang sporadis, namun sebisa mungkin bencana tersebut dikelola dan direduksi. Oleh karena itulah, bencana bukan lagi dianggap sebagai hazard yang menempatkan bencana sebagai sesuatu yang absurd untuk dikelola. Akan tetapi, bagaimana kemudian kita menempatkan unsur keselamatan (safety) dalam bencana tersebut.

Munculnya gagasan “kerentanan” (*vulnerability*) adalah untuk mengakomodasi pranata maupun unit sosial sebagai bagian dari kajian bencana. Khususnya terhadap eksistensi peradaban dan kehidupan manusia yang berada di dunia. Bencana berikut faktor pemicu maupun implikasinya terhadap kehidupan manusia perlu untuk direduksi maupun terdeteksi sedini mungkin, sehingga dari situlah kemudian menciptakan **skema manajemen bencana**. Adapun penggunaan istilah perspektif “*cultural theory*” yang digunakan dalam tulisan ini adalah suatu cara bagaimana dan mengapa individu memberikan penilaian terhadap bencana begitu juga potensi kerusakan yang ditimbulkannya. Hal ini terkait dengan upaya pemenuhan hak keadilan sosial kepada masyarakat untuk mengetahui informasi kebencanaan secara akurat dan mendetail.

Pemenuhan hak tersebut menjadi penting utamanya dalam mengkonstruksikan bencana tersebut karena isu penanggulangan bencana sendiri tidak terlepas dari **tiga premis utama yakni kekuasaan (*power*), keadilan (*justice*), dan legitimasi kekuasaan (*legitimacy*)**. Relasi kekuasaan terhadap penanggulangan bencana adalah melihat bagaimana respons negara dalam menangu-

langi dampak destruktif bencana baik dari segi sosial maupun ekologis dan konstruksi informasi publik yang dihadirkan negara terhadap bencana dan dampaknya kepada masyarakat. Isu keadilan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial bagi masyarakat dan legitimasi sendiri terkait dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menanggulangi bencana (Douglas, 2001 : 34). Ketiga hal tersebut dikristalkan dalam bentuk pemahaman *risk regulatory regime* yakni karakteristik rezim suatu negara dalam menanggulangi bencana.

Walaupun sebuah krisis dapat menjadi titik balik bagi semakin baiknya sebuah keadaan, tampaknya hampir tidak ada pimpinan organisasi yang mengharapkan situasi demikian untuk memperbaiki keadaan. Atau paling tidak organisasi tidak ingin mengalami suatu krisis. Karena mereka berharap demikian, mereka lupa bahwa krisis dapat saja terjadi pada perusahaan mereka, sehingga banyak pengelola perusahaan yang tidak menyadari pentingnya suatu perencanaan khusus untuk menghadapi dan menangani krisis yang mungkin muncul.

Wisensblit (1989 : 33) menyatakan :

*“Too often successful companies are complacent. Management reads about other companies disaster with an it-cant’s –happen-here attitude. They simply do not see the risk potential. Part of this because people are generally reluctant to think about crisis. But, thinking negatively – thinking of the worst possible disasters that could befall the company and planning for them – is the basis for crisis management planning”*

Krisis tidak bergerak spontan, ia selalu diawali dengan gejala. Yang kadang tidak terlihat atau terdeteksi oleh perusahaan. Sehingga kurang tepat jika ada statement dari perusahaan atau organisasi yang mengatakan bahwa krisis di perusahaan mereka datangnya tiba-tiba. Karena krisis bergerak dari satu tahap ke tahap lainnya. Ketika tidak diantisipasi pada tahap awal, ia akan makin meluas dan merugikan organisasi dan publiknya. Tahapan krisis atau lazimnya disebut sebagai anatomi krisis memiliki arti yang berbeda-beda oleh sebagian ahli. Oleh Fink (1986) dan Sturges, dkk (1991) menyatakan ada empat fase yang dilewati oleh sebuah krisis. Sedangkan Fearn-Banks (1996) menyebutkan lima fase dari sebuah krisis. Namun secara garis besar kedua pendapat ini tidak menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Gonzales-Herrero dan Pratt (1995) menganalogikan krisis seperti tahapan kehidupan: kehamilan, kelahiran, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan (kematian).

Menarik yang terjadi dalam pengelolaan bencana di Banaran. Berdasarkan hasil survei Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNIDA Gontor (2017) dengan jumlah 37 KK atau sebanyak 134 anggota keluarga dimana jumlah korban 26 orang meninggal; 28 bangunan rumah hilang. Disisi lain respon organisasi non-pemerintah sangat besar, yaitu: 41 posko dengan terkumpulnya dana dalam bentuk tunai sebesar Rp 1,828,015,000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lapan juta lima belas ribu rupiah), diluar bantuan dalam bentuk beras, mie instan, obat-obatan dan logistik yang lain. Belum termasuk jumlah relawan sebanyak 1.682 personil, yang terdiri dari Polres Ponorogo 188 personil; Brimob 76 personil; Sabhara Polda 60 personil; K-9 18 personil; TNI 180 personil; BPBD 90 personil; Dinkes 90 personil; PMI 30 personil; Relawan 1000 personil; DVI Polda Jatim 10 personil; RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) sebanyak 50 anggota. Belum termasuk dari berbagai organisasi massa yang berbondong-bondong di lokasi.

Memang dalam konteks manajemen krisis apa yang terjadi di Banaran tidak sebagaimana pendapat Fearn-Banks (1996:1) sebuah krisis mengganggu transaksi normal dan kadang mengancam kelangsungan hidup atau keberadaan organisasi. Juga tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Shrivastava dan Mitroff (1987: 6) diasosiasikan dengan kerusakan yang berskala luas terhadap kehidupan manusia, lingkungan alam dan institusi social dan politik. Maksudnya dalam konteks Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, tetapi dalam konteks Pemerintahan Desa Banaran segala unsur krisis sebagaimana pendapat Fearn-Banks (1996) dan Shrivastava dan Mitroff (1987) terpenuhi, yaitu: disamping adanya krisis mengganggu transaksi normal dan kadang mengancam kelangsungan hidup atau keberadaan organisasi (desa Banaran), juga diasosiasikan dengan kerusakan yang berskala luas terhadap kehidupan manusia, lingkungan alam dan institusi social dan politik, dalam konteks Pemerintahan Desa.

Jadi yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintahan Desa (Pemdes) Banaran dari Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, dimana dalam hal ini yang sebagai leading sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo, yaitu: support dalam bentuk landasan hukum, prosedur dan mekanisme serta panduan praktis baik dalam tahap pencegahan, tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi.

- 1). **Tahap pencegahan**, pada tahap ini berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan dampak buruk dari bencana alam. Beberapa kegiatan pada tahap ini adalah: penyadaran masyarakat pentingnya reboisasi dan pentingnya pemahaman bahaya penebangan hutan secara liar; juga soal pemahaman tekstur tanah, khususnya keterkaitan dengan jenis tanaman.
- 2). **Tahap tanggap darurat**, pada tahap tanggap darurat, hal paling pokok yang sebaiknya dilakukan adalah penyelamatan korban bencana alam. Inilah sasaran utama dari tahapan tanggap darurat. Selain itu, tahaptanggap darurat bertujuan membantu masyarakat yang terkena bencana alam langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Para korban juga perlu dibawa ke tempat sementara yang dianggap aman dan ditampung di tempat penampungan sementara yang layak. Pada tahap ini dilakukan pula pengaturan dan pembagian logistik atau bahan makanan yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana alam.

Secara operasional, pada tahap tanggap darurat ini meliputi kegiatan: -penanganan korban bencana alam termasuk mengubur korban meninggal dan menangani korban yang luka-luka. -penanganan pengungsi, -pemberian bantuan darurat, -pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih, -penyiapan penampungan sementara, -pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum sementara serta memperbaiki sarana dan prasarana dasar agar mampu memberikan pelayanan yang memadai untuk para korban;

- 3). **Tahap Rehabilitasi**, dalam tahap rehabilitasi, upaya yang dilakukan adalah perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan pengembalian harkat korban. Tahap ini bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi adalah untuk memperbaiki pelayanan masyarakat atau publik sampai pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini juga diupayakan

penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek kejiwaan/psikologis melalui penanganan trauma korban bencana alam.

- 4). **Tahap Rekonstruksi**, upaya yang dilakukan pada tahap rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana, prasarana serta fasilitas umum yang rusak dengan tujuan agar kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Biasanya melibatkan semua masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran utama dari tahap ini adalah terbangunnya kembali masyarakat dan kawasan. Pendekatan pada tahap ini sedapat mungkin juga melibatkan masyarakat dalam setiap proses.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah memberi pendampingan kepada Pemerintahan Desa Banaran Kecamatan Pulung dalam menerapkan manajemen krisis dalam penanganan bencana tanah Longsor di Banaran.

Ini dilakukan karena dalam konteks *risk regulatory regime* ini **menempatkan negara sebagai aktor tunggal** dalam penanggulangan bencana. Konsepsi ini terkait dengan karakteristik penanggulangan bencana yang dilakukan oleh negara yang berbeda disesuaikan dengan keadaan ekologis, geologis, maupun morfologis negara tersebut (Kreps, 1985: 51). Paradigma risiko muncul sebagai wujud dari perkembangan lanjutan modernisasi kehidupan manusia di dunia. Istilah risiko sendiri diartikan sebagai sebuah kemungkinan serangan fisik yang diakibatkan dari perkembangan teknologi dan prosesnya. Artinya, risiko bencana sendiri terjadi dari sebuah proses perkembangan manusia di dunia dan bukan disebabkan oleh faktor alamiah bencana alam. Pemahaman risiko menarik dicermati untuk melihat keseimbangan relasi antar manusia dan alam selama ini yang menunjukkan gejala yang tidak seimbang.

Lebih lanjut, makna bencana sebagai kejadian (*events*) diartikan sebagai kejadian luar biasa (*extraordinary events*) yang memiliki pengaruh terhadap instabilitas manusia. Bencana sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga macam yakni fisik (*physical*), waktu (*temporal*), dan sosial (*social*). Artinya penanganan kasus bencana sendiri tidak bisa diseragamkan dalam satu pola saja. Misalnya saja dalam berbagai kasus penanganan di Indonesia sendiri, pola penanganan bencana berbasis kebutuhan *ad-hoc* selalu menjadi pilihan utama seperti pemberian bantuan makanan siap saji, perlengkapan tidur, maupun pakaian siap pakai. Dalam konteks ini, penanggulangan bencana perlu melihat pola dasar pemantik terjadinya sebuah bencana. Penanggulangan bencana juga perlu melihat waktu periode berlangsungnya bencana tersebut supaya upaya cepat melakukan evakuasi menjadi lebih efisien dan efektif.

Adapun yang dimaksudkan dengan mengelola risiko bencana dalam konteks ini adalah mengatur dampak bencana seminimal mungkin agar tidak menimbulkan dampak destruktif yang lebih besar lagi. Dalam pemahaman perspektif *cultural theory* yang menjadi tema utama dalam makalah ini, terdapat dua hal utama yakni pengetahuan tradisional dan pengetahuan modern. Dua hal tersebut sebenarnya sudah dibahas dalam sub bab sebelumnya dimana terdapat titik singgung antara tradisional yang berorientasi pada hal-hal bersifat sosial sedangkan pengetahuan modern berorientasi pada penanganan hal teknis. Pengetahuan modern lebih mengarah kepada pembentukan formulasi risiko/risk (R) merupakan bentuk dari gabungan eskalasi/exposure (E) dan besaran bencana/magnitude (M) sehingga membentuk format (R=EM) (Tansey, 1999 : 78).

Gagasan rezim pengelolaan bencana (*risk regulatory states*) sebenarnya merupakan bentuk institusionalisasi ide dari *cultural theory* tentang persepsi pengetahuan bencana oleh publik dengan menempatkan negara sebagai aktor tunggal dalam isu bencana tersebut. Penempatan negara sebagai rezim dalam isu penanggulangan risiko bencana ini tidak terlepas dari kegagalan pasar dan masyarakat dalam mengelola isu tersebut. Dalam teori *governance* memang terjadi desentralisasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat yang memiliki fungsi penyeimbang dan pengontrol satu sama lain. Namun dalam teori *cultural theory*, *governance* menjadi tidak berhasil dalam mengurus penanggulangan risiko bencana dikarenakan limitasi sumber daya yang dimiliki pasar dan masyarakat.

## METODE

Adapun metode yang digunakan memberi pendampingan kepada Pemerintahan Desa Banaran Kecamatan Pulung dalam menerapkan manajemen krisis dalam penanganan bencana tanah Longsor di Banaran, antara lain, yaitu:

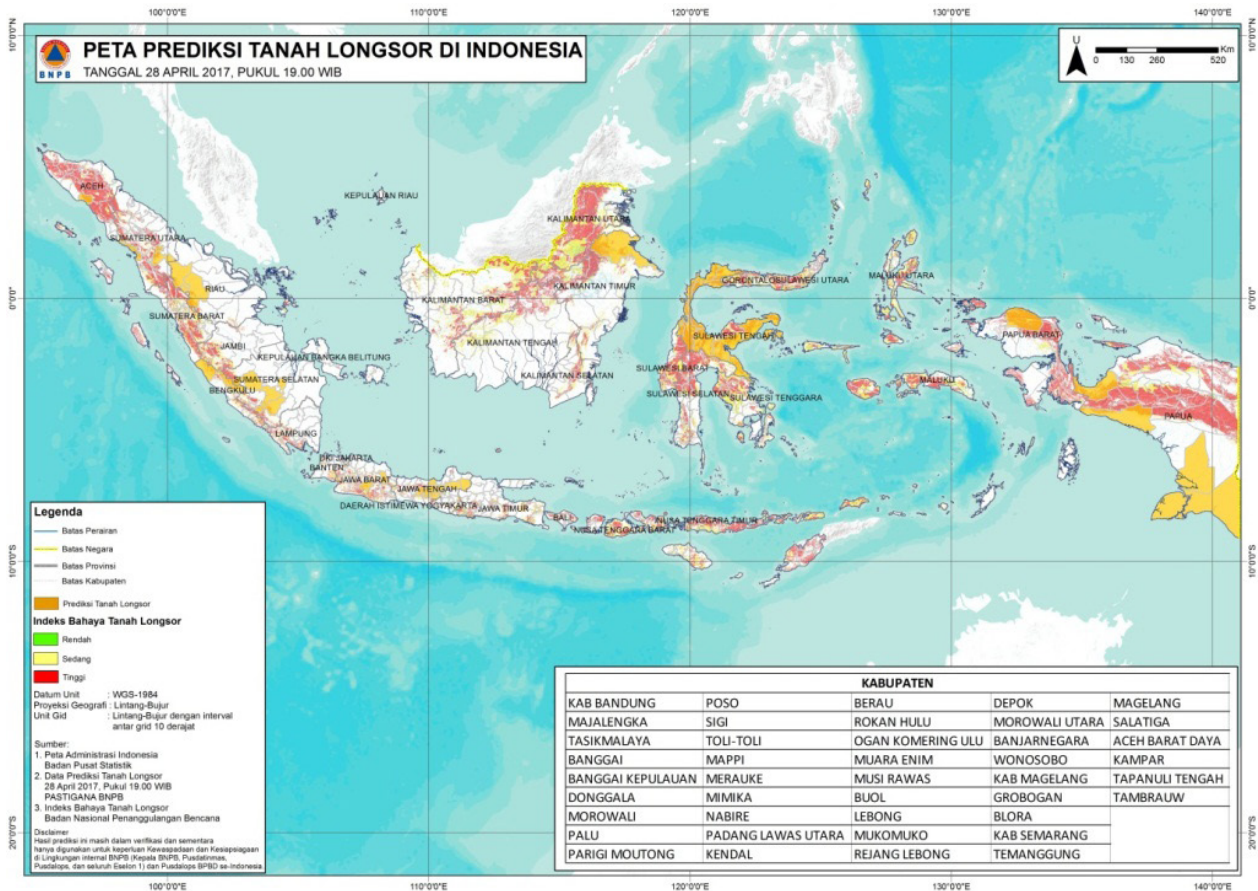
Tahapan awal, ada beberapa langkah yang dilakukan, antara lain, yaitu: 1) ekspos ke media sosial dalam rangka publikasi dan penggalangan dana. 2) Rekrutmen relawan dari kalangan akademisi, praktisi dan aktivis, termasuk membangun kerjasama dengan stakeholder, didalamnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo dan perguruan tinggi. 3) Penyusunan *action-plans* pendampingan.

Tahapan pelaksanaan, pada tahap ini dilakukan beberapa langkah, antara lain, yaitu: 1) pemetaan relawan dan proses penanganan bencana tanah Longsor di Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, baik dalam tahap pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. 2) Melakukan studi banding ke Bantul dalam rangka studi pengelolaan bencana, terutama pada tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. 3) Melakukan *Focus Group Discutios* (FGD), terutama para relawan yang terlibat dalam tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi. 4) Melakukan pelatihan/workshop Pemetaan Rawan Bencana bagi relawan dan petugas BPBD dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (c.q. BPBD Kabupaten Ponorogo).

**Tahapan monitoring dan evaluasi**, pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan audiensi dengan BPBD Kabupaten Ponorogo, BPBD Kabupaten Bantul dan Perguruan Tinggi, terutama UN-IDA Gontor dan Unmuh Ponorogo untuk menjadi mutu dan kelangsungan program tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Longsor merupakan salah satu ancaman bencana terbesar di Indonesia. Menurut data statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), longsor menduduki peringkat ketiga yang memiliki frekuensi kejadian tertinggi setelah banjir dan puting beliung. Sudibyakto (2011) mengemukakan bahwa tingginya angka kejadian longsor di Indonesia disebabkan karena potensi curah hujan di beberapa daerah yang tinggi, kondisi geologis, batuan yang lapuk, kedalaman solum tanah yang cukup tebal, adanya bidang gelincir yaitu lapisan batuan yang tidak tembus air (*impermeable layers*) di dalam tanah, dan adanya kemiringan lereng lebih dari 30°. Khususnya di Pulau Jawa, tatanan geologi, karakteristik topografi dan karakteristik iklim menyebabkan tingginya paparan longsor (Christanto et al, 2009).



(Sumber: Sadewa, 2016)

**Gambar 1.** Peta Prediksi Longsor di Indonesia

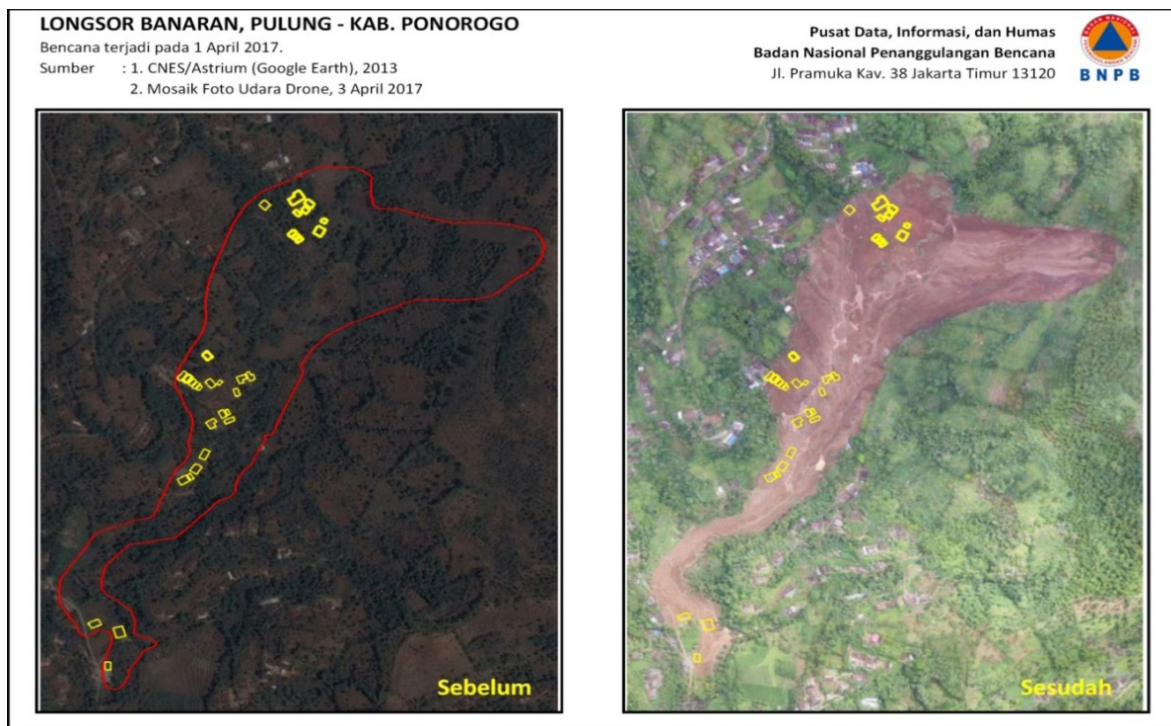
Menurut Sadewa (2016), faktor yang berkaitan dengan kejadian longsor di Pulau Jawa, antara lain :

- lokasi diatas zona subduksi, 60% wilayah Pulau Jawa merupakan pegunungan dengan rantai gunung volcano-tektonik dimana terdapat 36 gunung aktif dan material vulkanik ini telah terlapukkan secara intensif.
- Pulau Jawa dipengaruhi iklim tropis yang lembab dan intensitas curah hujan yang tinggi.
- Aktivitas manusia yang merupakan dampak kepadatan demografis Pulau Jawa turut andil sehingga berakibat pada ketidakstabilan lereng.

Volume tanah longsor yang dihasilkan tersebut menjadikan tanah longsor Banaran kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, tercatat sebagai salah satu kejadian tanah longsor yang pertama kali terjadi Ponorogo. Tanah longsor tersebut disebabkan oleh runtuhnya dinding kaldera. Bencana ini mengakibatkan kerusakan pada berbagai infrastruktur dan dampak buruk pada lingkungan. Dampak lainnya adalah ancaman aktivitas sedimen cenderung meningkat dan mengarah kepada ancaman bencana terutama pada musim hujan. Pengaruh curah hujan dalam menghasilkan longsor adalah suatu yang jelas, meskipun sangat sulit untuk menjelaskan secara tepat (Blong and Dunkerley, 1976).

Kesulitan ini muncul karena curah hujan hanya mempengaruhi stabilitas lereng secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap kondisi air-pori di dalam material lereng. Kemudian Caine (1980) menggunakan istilah “pengaruh pemicu” curah hujan terhadap tanah longsor atau aliran debris. Karakterisasi curah hujan yang memicu tanah longsor atau aliran debris telah digunakan untuk membangun hubungan antara curah hujan dan tanah longsor/aliran debris di berbagai belahan dunia. Parameter curah hujan paling sering diselidiki dalam kaitannya dengan inisiasi longsor meliputi curah hujan kumulatif, curah hujan terdahulu, intensitas curah hujan, dan durasi curah hujan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menentukan batasan dengan menggunakan berbagai kombinasi parameter.

Sebagian besar lereng runtuh/tanah longsor dipicu oleh curah hujan ekstrim, sejumlah peneliti (misalnya, Campbell, 1975; Cotecchia, 1978; Caine, 1980; Cannon and Ellen, 1985; Neary and Swift, 1987; Kim et al., 1991; Wilson et al., 1992; Larsen and Simon, 1993; Wilson and Wieczorek, 1995; Terlien, 1998; Crosta, 1998; Crozier, 1999; Glade et al., 2000; Wieczorek et al., 2000; Aleotti, 2004; Guzzetti et al., 2004; Hong et al., 2005) telah mencoba untuk menetapkan ambang batas intensitas curah hujan dalam memprediksi lereng runtuh/tanah longsor secara akurat. Berbagai hasil penelitian menentukan batas curah hujan dalam hal intensitas curah hujan, durasi dengan rasio intensitas curah hujan, curah hujan kumulatif pada waktu tertentu, rasio curah hujan dengan curah hujan harian, curah hujan terdahulu dengan curah hujan rata-rata tahunan, dan curah hujan harian dengan maksimum rasio curah hujan terdahulu



(Sumber: BNPB, 2016)

**Gambar 2.** Luasan Dampak Longsor Banaran, Ponorogo

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) telah melakukan prediksi terhadap kejadian longsor di beberapa wilayah Indonesia, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 2. Gambar



tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo belum menjadi kajian BNPB. Padahal, wilayah Kabupaten Ponorogo juga rentan terhadap longsor. Pada tanggal 1 April 2017, telah terjadi bencana longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Seketika itu pula Ponorogo langsung menjadi ikon menarik untuk liputan media massa. Hal ini dikarenakan belum adanya catatan longsor yang berdampak sebesar ini sebelumnya. Luasan wilayah yang terdampak longsor Banaran dijelaskan dalam gambar 2.

Longsor di Desa Banaran dengan korban jiwa dari 26 orang dan 28 bangunan rumah hilang. Selengkapnya bisa dilihat tabel berikut:

**Tabel 1:** Daftar Korban dan Berdampak Tanah Longsor Desa Banaran

No	Nama Kepala Keluarga	Jmlah Anggota Keluarga	Meninggal	Selamat	Rumah		Keterangan
					Ada	Hilang	
1.	Suroso	3	1	2	v		
2.	Sujadi	3	1	2	v		
3.	Suryono	4	1	2	v		
4.	Muklas	4	1	3	v		
5.	Katemun	4	1	3		v	
6.	Sogol	3	-	3		v	
7.	Jais	4	-	4		v	
8.	Jeminem	2	-	2		v	
9.	Pujianto	6	3	3		v	
10.	Menit	4	1	3		v	
11.	Mintoko	3	-	3		v	
12.	Madikan	5	-	5		v	
13.	Mesiyah	3	-	3		v	
14.	Bintomo	1	-	1		v	
15.	Gianto	4	2	2		v	
16.	Wiyoto	4	3	1		v	
17.	Lit Kusnim	3	2	1		v	
18.	Sirmadi	3	-	3		v	
19.	Tamikun	3	-	3		v	
20.	Suyatno	4	-	4		v	
21.	Meseni	4	-	4	v		Tidak dihuni
22.	Yahmi	4	-	4		v	
23.	Sujarwo	4	-	4	v		Tidak dihuni
24.	Hananto	5	-	5		v	
25.	Poniran	3	2	1		v	

26.	Bonari	5	3	2		v	
27.	Sunadi	2	1	1		v	
28.	Katenu/denu	3	-	3		v	
29.	Katani	3	1	2		v	
30.	Katemi	2	1	1		v	
31.	Meseri	1	-	1	v		Tidak dihuni
32.	Tolu	7	2	5	v		
33.	Kateno	2	1	1	v		
34.	Budi Suwito	4	-	4		v	
35.	Suwito	7	-	7		v	
36.	Sujari	3	-	3		v	
37.	Trimuryadi	4	-	4		v	
	<b>Jumlah</b>	<b>134</b>	<b>28</b>	<b>106</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>3</b>

Sumber: Pemerintah Desa Banaran, 2017

Sekarang bagaimana dengan penerapan manajemen krisis yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemerintahan Desa Banaran, Kecamatan Pulung dalam penanganan bencana long-sor ? Berdasarkan hasil pendampingan bahwa yang dilakukan Pemerintah Desa Banaran dalam tahap pencegahan tidak dilakukan secara baik. Dimana hampir seluruh tanah di bukit sekitar lokasi bencana saat ini menjadi ladang jahe. Seharusnya bukit tidak boleh diubah menjadi ladang atau sawah. Perubahan fungsi tanah tersebut membuat kondisi tanah tidak stabil. Jadi, kalau bukit dibuat ladang, tegalan apalagi sawah, maka potensi longsornya akan sangat besar (Herry Purnomo, Ketua Tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG, 2017).

Dalam konteks ini disamping karena faktor ketidak-pahaman, juga yang tidak kalah penting adalah faktor motif ekonomi. Dimana jahe di Banaran mempunyai kualitas yang tinggi dan tentunya juga mempunyai nilai jual yang tinggi. Bahkan diantara mereka ada yang ekspor jahe ke luar negeri. Problemnya tanah itu disatu sisi sangat baik untuk tumbuhnya jahe, tetapi sebaliknya bahwa tanaman jahe sangat berbahaya dengan tesktur tanah di Banaran. Kondisi ini tidak mudah bagi Pemerintahan Desa Banaran untuk bersikap.

Sedangkan dalam tanggap darurat yang menarik adalah kehadiran dan keterlibatan relawan. Berdasarkan hasil survei Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNIDA Gontor (2017) dengan jumlah 37 KK atau sebanyak 134 anggota keluarga dimana jumlah korban 26 orang meninggal; 28 bangunan rumah hilang. Disisi lain respon organisasi non-pemerintah sangat besar, yaitu: 41 posko dengan terkumpulnya dana dalam bentuk tunei sebesar Rp 1,828,015,000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lapan juta lima belas ribu rupiah), diluar bantuan dalam bentuk beras, mie instan, obat-obatan dan logistik yang lain. Belum termasuk jumlah relawan sebanyak 1.682 personil, yang terdiri dari Polres Ponorogo 188 personil; Brimob 76 personil; Sabhara Polda 60 personil; K-9 18 personil; TNI 180 personil; BPBD 90 personil; Dinkes 90 personil; PMI 30 personil; Relawan 1000 personil; DVI Polda Jatim 10 personil; RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia)

sebanyak 50 anggota. Belum termasuk dari berbagai organisasi massa yang berbondong-bondong di lokasi.

Fenomena itu cukup menarik, pertama, dengan besarnya kehadiran dan keterlibatan relawan sebagai bukti tingginya tingkat kepekaan dan kepedulian masyarakat Indonesia dan khususnya Ponorogo, terlepas efek dari faktor media massa (mainstream maupun alternatif). Kedua, fenomena tersebut sebagai bukti bahwa dalam tanggap bencana ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dibanding pencegahan, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Ketiga, disisi lain tentunya adanya masalah terkait efisiensi dan efektivitasnya, bahkan miss-manajemen dalam penanganan bencana. Bagaimana tidak dengan jumlah korban dengan dibandingkan jumlah relewan? Ini mungkin yang perlu evaluasi. Padahal, misalnya terkait dengan logistik untuk menangani 37 keluarga. Tidak perlu 41 posko. Cukup 4-5 posko bisa terselesaikan. Terus bagaimana dengan logistik dari sekian posko? Apakah benar-benar sampai ke sasaran?



**Gambar 3:** Penulis di Lokasi  
(Sumber: dok. Pribadi, 2017)

Sedangkan dalam tahap rehabilitasi, dimana tahap ini bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi adalah untuk memperbaiki pelayanan masyarakat atau publik sampai pada tingkat yang memadai. Kerjasama antara unsur non-pemerintah dan pemerintah, termasuk Polri dan TNI cukup baik. Ada beberapa yang dilakukan, misalnya, memindahkan siswa sekolah dasar Banaran, Kabupaten Ponorogo di teras Masjid Jami di Dusun Krajan. Gedung SD Banaran memang berada di jalur rawan longsor susulan.

Juga yang dilakukan oleh LPPM Unida Gontor dengan menggandeng relawan dari mahasiswa UNMUH Ponorogo dengan melakukan pendampingan belajar siswa kelas 6 menghadapi ujian nasional; juga melakukan pendampingan wisata bagi korban bencana longsor Banaran. Juga Pondok Ramadhan dan bekerjasama dengan mahasiswa KKN Unida Gontor. Bentuk lain juga yang dilakukan oleh LAZISMU dengan mengadakan berbuka bersama dengan masyarakat korban Bencana. Namun semua, bukan inisiatif pemerintah, tetapi kreasi relawan.

Adapun dalam tahap rekonstruksi, sasaran utama dari tahap ini adalah terbangunnya kembali masyarakat dan kawasan. Pendekatan pada tahap ini sedapat mungkin juga melibatkan masyarakat dalam setiap proses. Hasil rapat bersama dengan Pemprov Jatim, Pemkab Ponorogo, dan semua

pihak terkait termasuk TNI, para korban longsor yang saat ini mengungsi berhak atas rumah. Ukurannya 6x8 meter. Diperkirakan, lokasi yang dijadikan tempat relokasi itu berada satu wilayah desa. Tempatnya saat ini tengah dicari yang paling laik. Ada 36 KK atau 108 orang yang saat ini menjadi korban longsor. Realisasi dari program tersebut adalah pembangunan rumah dengan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dari partisipasi masyarakat berupa pembangunan dan renovasi tempat ibadah, baik masjid dan mushola-mushola; juga bantuan penerangan jalan.

Berdasarkan gambaran di atas untuk mengetahui sejauhmana perubahan dalam penerapan manajemen krisis yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Banaran. Memang tidak mudah. Karena secara umum baru menghadapi sekali ini, baik dalam pencegahan, tanggap bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Mungkin yang paling signifikan adalah perubahan terkait dengan pencegahan. Dimana selama ini mereka hanya berpikir ekonomi an sich. Kini sudah memperhatikan mulai dan semakin memperhatikan lingkungan menjadi faktor penting dalam setiap pengambilan kebijakan.

Bagaimana efektivitas metode yang digunakan ? Ada beberapa metode pelaksanaan pendampingan yang dilakukan, antara lain, yaitu: 1) ekspos ke media sosial dalam rangka publikasi dan penggalangan dana. 2) Rekrutmen relawan dari kalangan akademisi, praktisi dan aktivis, termasuk membangun kerjasama dengan stakeholder, didalamnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo dan perguruan tinggi. 3) Penyusunan action-plans pendampingan. 4) pemetaan relawan dan proses penanganan bencana tanah Lonsor di Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, baik dalam tahap pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. 5) Melakukan studi banding ke Bantul dalam rangka studi pengelolaan bencana, terutama pada tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. 6) Melakukan Focus Group Discutios (FGD), terutama para relawan yang terlibat dalam tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi. 7) Melakukan pelatihan/ workshop Pemetaan Rawan Bencana bagi relawan dan petugas BPBD dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (c.q. BPBD Kabupaten Ponorogo). 8) melakukan audiensi dengan BPBD Kabupaten Ponorogo, BPBD Kabupaten Bantul dan Perguruan Tinggi, terutama UNIDA Gontor dan Unmuh Ponorogo untuk menjadi mutu dan kelangsungan program tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas ditarik kesimpulan, Pertama, bahwa capaian program dengan rancangan program di awal ada yang sesuai, seperti, perubahan dalam pencegahan. Sedangkan yang melampaui capaian adalah dalam tahap tanggap bencana dan rehabilitasi. Adapun yang kurang sesuai dengan capaian adalah dalam tahap rekonstruksi.

Kedua, perubahan yang dialami oleh mitra dalam hal ini pemeritahan Desan Banaran dan masyarakatnya adalah arti pentingnya pencegahan, yang selama ini dianggap remeh, ternyata berakibat fatal.

Berdasarkan simpulan di atas ada yang perlu ditindak-lanjuti oleh pengabdian masyarakat yang lain, yaitu perlunya peningkatan intensitas komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder, terutama dalam tahap rekontruksi. Juga dalam tahap tanggap bencana sudah sangat baik, tetapi perlu dibe-nahi dari segi manajemen krisisnya.

Sedangkan bagi pemeritaha perlu diformat BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

yang mengawinkan antara profesionalisme birokrasi dan kelincahan LSM atau organisasi non-pemerintah yang tanggap dan sigap.

Adapun bagi masyarakat, khususnya Desa Banaran Kecamatan Pulung untuk bercocok tanam tidak semata-mata mengejar pertimbangan bisnis, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, David. 2006. Globalization of Disaster. *Journal of International Affairs*, Vol.59, No.2. hal 1-23.
- Beck, Ulrich. 1992. *Risk Society : Toward New Modernity*. London : Sage Publication.
- Blaikie, P. 1994. *Disaster Pressure and Release Model in At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. Routledge London
- Christanto, W.N., Hadmoko, D.S., Westen, C.J., Lavigne, F., Sartohadi, J., dan Setiawan (2009), *Characteristic and Behavior of Rainfall Induced Landslides in Java Island, Indonesia: an Overview* Geophysical Research Abstract. Vol. 11. EGU General Assembly.
- Douglas, Mary. 2001. *Risk and Blame*. New York : Taylor & Francis.
- H.A. Sudibyakto (2011), "Perubahan Paradigma dalam Manajemen Bencana", yang disampaikan dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar di Ruang Senat UGM, Yogyakarta, Selasa, 22 Februari 2011
- H.A. Sudibyakto (2011), *Manajemen bencana di Indonesia ke Mana ?* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Cet. 1
- Hood, Christopher. 2001. *The Government of Risk*. New York : Oxford University Press.
- Kreps, G.A. 1984. *Sociological Inquiry and Disaster Research*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 10. No.1, hal. 309-330.
- Kreps, G.A. 1984. *Sociological Inquiry and Disaster Research*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 10. No.1, hal. 309-330.
- Marsefio S. Luhukay, "Penerapan Manajemen Krisis Di Indonesia : Memotret Krisis Dalam Kacamata Public Relations", dalam Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 2, No. 1, Januari 2008: 18 – 28.
- Sadewa, Resi (2016), *Kesiap-siagaan Masyarakat Terhadap Kerawanan Tanah Longsor di DAS Bompom Kabupaten Magelang*, Tesis, Sekolah Pascasarjana, UGM, Yogyakarta.
- Smith, Anthony-Oliver. 1996. *Anthropological Research on Hazards and Disasters*. *Annual Review of Anthropology*, Vol. 25. No.2. hal. 303-328.
- Tansey, James. 1999. *Cultural Theory And Risk: A Review*. *Health, Risk & Society*, Vol.1, No.1, hal 71-90.